

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
(Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten
Malang)**

Fina Septivia Sherly Anggraini¹, Nurul Umi Ati², Taufiq Rahman Ilyas³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*
E-mail: finaseptiviasherly@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan isi tujuan kepariwisataan yang diwujudkan melalui kebijakan pengembangan desa wisata dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya. Proses implementasi kebijakan tersebut masih ditemui permasalahan diantaranya kurangnya sumber daya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang belum maksimal. Hal tersebut melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Poncokusumo yang difokuskan pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan 2 teori. Pertama, teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan 4 indikator. Kedua, partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022) dengan 3 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dan partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022), implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo sudah berjalan dengan baik. (2) Faktor pendukung meliputi faktor internal yaitu kerja sama antar pemangku kebijakan dan kerja keras anggota Pokdarwis serta faktor eksternal yaitu potensi bentang alam dan budaya. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor internal yaitu kemampuan public speaking SDM pengelola serta hambatan secara eksternal yaitu sarana prasarana berupa akses jalan dan sumber air serta kurangnya dukungan dana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Desa Wisata, Partisipasi Masyarakat.

Pendahuluan

Pada dasarnya, pembangunan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala aspek kehidupan dipengaruhi oleh proses pembangunan, yang berlangsung baik di tingkat makro (nasional) maupun mikro (masyarakat/kelompok). Meningkatnya jumlah populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengakibatkan tuntutan kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu negara berkembang yang aktif melaksanakan pembangunan adalah Indonesia pada segala aspek, baik ekonomi, sosial budaya, Sumber Daya Manusia (SDM), industri, pertahanan dan keamanan, serta politik. Kegiatan pembangunan merupakan kolaborasi antara masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai pengelola. Dengan demikian kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling mendukung dan melengkapi dalam satu kesatuan untuk tujuan pembangunan nasional.

Tujuan negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka diperlukan pembangunan nasional yang terencana mulai dari pemerintah pusat hingga desa sebagai satuan pemerintahan terendah. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi fokus pemerintah salah satunya melalui sektor pariwisata.

Pembangunan dalam sektor pariwisata merupakan program unggulan pemerintah yang memiliki prospek yang menjanjikan dalam rangka mempercepat laju pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan laut yang luas, wilayah pegunungan, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan demikian, Indonesia memiliki pemandangan alam yang indah sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, kekayaan

budaya, adat, sejarah, dan agama menjadi keunikan tersendiri yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata.

Salah satu daerah otonom pengelola kepariwisataan dengan potensi yang menarik wisatawan adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki topografi berupa dataran tinggi, dataran rendah, atau lembah, dan dikelilingi beberapa gunung dengan ketinggian 250-500 mdpl. Kawasan dataran tinggi ini terdiri dari perbukitan kapur yang berada pada ketinggian antara 0-650 mdpl di bagian selatan, lereng Tengger-Semeru di bagian timur dengan ketinggian antara 500 hingga 3.600 mdpl, dan Lereng Kawi-Arjuno di sebelah barat di ketinggian antara 500 hingga 3.300 mdpl.

Kondisi Geografis Kabupaten Malang tersebut menjadi potensi yang strategis menjadi daya tarik pengunjung baik lokal maupun luar negeri. Selain itu, menjadi wilayah yang luas dan terbagi dalam 33 Kecamatan, Kabupaten Malang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata budaya Indonesia karena keunikan budaya dan tradisinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Malang memiliki daya tarik pariwisata baik kondisi alam, keragaman budaya, adat istiadat, kuliner, maupun kreativitas masyarakatnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai motor penggerak kepariwisataan di Kabupaten Malang secara aktif mengembangkan potensi wisata sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pembangunan desa dan pembangunan pariwisata termasuk di Kabupaten Malang ialah melalui pengembangan desa wisata. Konsep wisata pedesaan, atau "*rural tourism*", dengan penawarannya yang khas, ramah lingkungan, dan satu-satunya, dapat menghadirkan pendekatan baru untuk pengembangan pariwisata global (Susyanti, 2014: 66).

Diantara tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan yaitu melestarikan alam, lingkungan hidup, dan sumber daya berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Hal tersebut sejalan dengan konsep desa wisata yang merupakan penawaran destinasi pariwisata dengan memanfaatkan kearifan lokal dan keunggulan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan desa wisata didorong oleh sumber daya dan adat istiadat masyarakat yang khas, sehingga partisipasi masyarakat utamanya masyarakat lokal sangat penting bagi pengembangannya. Masyarakat setempat berperan sebagai tuan rumah dan menjadi aktor utama yang sangat penting pada perkembangan desa wisata dalam segala yang terdiri dari tahapan persiapan, pengamatan hingga pelaksanaan. (Dewi, 2013: 132). Dengan demikian masyarakat tidak hanya

sekedar objek atau penerima manfaat, melainkan sebagai fokus dan subjek pembangunan. Menurut Marschall terdapat 3 indikator partisipasi masyarakat yaitu: (1) Adanya kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, (2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, (3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan (Darin, 2022: 14-15).

Dari 29 desa wisata di Kabupaten Malang, Desa Wisata Poncokusumo merupakan desa wisata yang menjadikan potensi alam sebagai unggulannya. Berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang Nomor 556/561/kep/421.108/2014 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014 Desa Poncokusumo ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2014.

Desa Poncokusumo merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang letaknya di kaki Gunung Semeru tepatnya di lereng sebelah barat, di sebelah selatan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dengan luas daerah 68.623 ha dan memiliki suhu sekitar 22-26°C. Desa Poncokusumo terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Poncokusumo dan Dusun Drigu. Masyarakat Desa Poncokusumo sebagian besar bekerja sebagai petani yang menanam berbagai tanaman seperti bawang, tomat, kentang, kol, apel, jeruk, bunga krisan, dan lain-lain. Sebagai desa yang terletak di dataran tinggi. Desa Poncokusumo memiliki keindahan alam dengan didominasi persawahan, perkebunan, dan perbukitan. Hal tersebut menjadikan Desa Poncokusumo sebagai tempat yang cocok untuk wisata berbasis alam. Beberapa wisata yang telah dikembangkan di Desa Wisata Poncokusumo ialah Bumi Perkemahan Ledok Ombo, Sedaer River Tubing, kawasan pendakian dan *camping* Jamun *Spot Sunset* (JSS), Taman Kali Lesti Poncokusumo, Kebun buah, dan Kebun Bunga Krisan. Selain tempat wisata yang dikembangkan, Desa Wisata Poncokusumo juga memiliki pendukung pariwisata berupa transportasi, akses jalan, dan penginapan. Pengembangan Desa Wisata Poncokusumo juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat diantaranya usaha tempat makan dan cafe, jasa transportasi (travel, ojek), usaha penginapan (*homestay*), dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa Poncokusumo sebagai pemangku kebijakan, terus mengembangkan potensi kepariwisataan desa sebagai wujud implementasi kebijakan pengembangan desa wisata untuk kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam suatu proses kebijakan. Keberhasilan kebijakan bergantung dalam bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2010:90-92), terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III, Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Wisata Poncokusumo dipengaruhi oleh variabel tersebut. Banyaknya potensi di Desa Wisata Poncokusumo menjadikan banyak peluang pariwisata untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, beberapa potensi yang tersedia belum secara maksimal dikembangkan oleh Pemerintah Desa Poncokusumo sebagai pelaksana kebijakan desa wisata. Salah satu objek wisata Desa Poncokusumo belum terakomodasi dengan baik adalah objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS).

Berdasarkan kategori pengembangan, Obyek Wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) memiliki potensi pengembangan wisata yang cukup signifikan. Berdasarkan penelitian objek wisata tersebut mendapat nilai baik diantaranya pada aspek daya tarik wisata dengan nilai 900 dari 1440, potensi pasar dengan nilai 925 dari 950, keamanan dengan nilai 525 dari 600, dan pengaturan pengunjung dengan nilai 90 dari 90. (Wibawati, 2021:59). Jamun *Spot Sunset* (JSS) merupakan wisata yang didirikan oleh masyarakat Desa Poncokusumo sejak 2019. Aktivitas wisata yang dapat dinikmati di Jamun *Spot Sunset* (JSS) diantaranya fenomena terbit dan tenggelamnya matahari (*sunrise* dan *Sunset*). Bentang alam yang ada di kawasan Jamun *Spot Sunset* (JSS) merupakan kawasan perbukitan sehingga memiliki keindahan pemandangan serta udara yang segar. Selain itu, aktivitas yang menarik di kawasan wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) adalah hiking dan *camping*. Jalan menuju bukit Jamun *Spot Sunset* (JSS) merupakan jalur yang menarik untuk dilalui pendaki pemula serta menjadi *spot* yang cocok untuk berkemah wisatawan. Keunikan dan keunggulan tersebut menjadi potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yang unggul.

Potensi yang dimiliki Jamun *Spot Sunset* (JSS) hendaknya dapat menjadi unggulan Desa Wisata Poncokusumo sebagai upaya meningkatkan pembangunan desa. Namun, pengembangan tersebut masih memiliki beberapa kendala. Seperti berdasarkan penelitian terdahulu oleh Wibawati, objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) mendapat rating sedang yang menandakan bahwa pelayanan wisata, penginapan dan infrastruktur pendukung lainnya belum maksimal (Wibawati, 2021: 52).

Hal tersebut selaras dengan penuturan pengunjung wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) yaitu “Sebenarnya wisata JSS ini punya ketertarikan tersendiri, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi sarana prasarananya seperti rumah makan dan sumber air bersih karena di musim kemarau sumber

airnya terlalu jauh” (wawancara 30 Desember 2022). Serta “JSS ini letaknya tidak jauh dari objek wisata lainnya. Untuk sampai ke sana tentunya tidak mudah dengan kondisi jalan masih berupa tanah yang lebarnya sekitar 1,5 meter, banyak gundukan, dan sedikit becek” (Wawancara 30 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara dengan pengunjung wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) tersebut, pengembangan wisata mengalami masalah berupa kurangnya sarana prasarana yang termasuk dalam sumberdaya fasilitas. Selain itu, wawancara dengan pengunjung lain mengatakan bahwa

“wisata JSS ini sangat unik ya, punya daya tarik yang berbeda dengan wisata lainnya, bisa *camping* dan mendaki juga. Tapi mungkin karena ini wisata yang tergolong baru perencanaan objek dan pengorganisasiannya bisa dikembangkan jauh lebih baik” (wawancara 30 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, masalah yang masih dihadapi dalam pengembangan desa wisata khususnya pada objek wisata JSS adalah kurangnya perencanaan objek dan pengorganisasian. Dalam hal ini, masalah tersebut terjadi karena struktur birokrasi pengelola objek wisata yang belum maksimal serta sumberdaya manusia yang masih kurang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata pada objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) diantaranya:

1. Kurangnya sumber daya fasilitas
2. Kurangnya sumber daya manusia
3. Struktur birokrasi belum maksimal

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Poncokusumo yang difokuskan pada objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) dengan judul penelitian “**Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang)**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di objek wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di objek wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis

partisipasi masyarakat di objek wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di objek wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian lainnya di bidang administrasi publik dan kepariwisataan.
 - b. Sebagai bahan dalam pengembangan administrasi khususnya kebijakan publik terkait desa wisata.
2. Manfaat Praktis
Sebagai masukan bagi pelaku wisata khususnya dalam pengembangan Desa Wisata Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Publik
Menurut George Charles Edward III (1980) yang dikutip dalam Anggara (2018), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 indikator, yaitu:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi
2. Pengembangan Desa Wisata
Simanungkulit (2012) Desa wisata didefinisikan sebagai tempat yang ditujukan untuk kegiatan kepariwisataan, juga dikenal sebagai destinasi wisata, yang menggabungkan daya tarik wisata, ruang publik, layanan wisata, dan aksesibilitas dalam struktur kehidupan masyarakat sesuai dengan kebiasaan dan tradisi setempat.
3. Partisipasi masyarakat
Adisasmita (dalam Prabowo, 2016:20) mendefinisikan sebagai terwujudnya pengorbanan diri dan kemampuan serta keinginan atau kapasitas masyarakat untuk mewujudkan pembangunan serta menjadi wujud pemberdayaan masyarakat yang mencakup aktivitas perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk

mendiskripsikan suatu fenomena secara keseluruhan, meluas, dan dalam.

Fokus Penelitian

Dalam rangka membatasi pembahasan serta memperoleh gambaran spesifik mengenai penelitian, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS) menggunakan teori:
 - a. Implementasi kebijakan George Charles Edwards III dengan indikatornya yaitu:
 - 1) Komunikasi
 - 2) Sumber daya
 - 3) Disposisi
 - 4) Struktur birokrasi
 - b. Partisipasi masyarakat menurut Menurut Marschall (dalam Darin, 2022), dengan 3 yaitu:
 - 1) Adanya kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat.
 - 2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
 - 3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS) yang terdiri dari:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Internal (dari dalam)
 - 2) Eksternal (dari luar)
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Internal (dari dalam)
 - 2) Eksternal (dari luar)

Setting Penelitian

Setting penelitian adalah lokasi atau tempat dilakukannya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Wisata Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah di Kantor Desa Poncokusumo, Kawasan wisata Jamun Spot Sunset (JSS), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncokusumo.

Sumber Data

1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberi informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2017:193). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari informasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian

dilakukan, khususnya melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dan observasi yaitu pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pengelola objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS).

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2017:193). Oleh karena itu, data didapatkan melalui media yang dapat berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun internet dan sumber terkait lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati sekitar untuk mengetahui tingkah laku dan keadaan. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati hal yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mengumpulkan informasi. Melalui wawancara dengan beberapa narasumber akan diketahui pendapat yang saling melengkapi mengenai implementasi kebijakan Desa Wisata Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Pemerintah Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
 - a) Kepala Desa Poncokusumo
- 2) Kawasan wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS)
 - a) Pengelola objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS)
- 3) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncokusumo
 - a) Penasehat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncokusumo.

3. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini, referensi tentang implementasi kebijakan pengembangan desa wisata dikaji sebagai bagian dari studi kepustakaan, khususnya di Desa Wisata Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dengan demikian, studi kepustakaan akan menghasilkan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Analisis data interactive model menurut pendapat Miles & Huberman, dan Saldana digunakan dalam penelitian. Tahapan analisis data menurut Miles & Huberman dan Saldana yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan tahap pertama dimana peneliti menghimpun informasi untuk bahan penelitian menggunakan teknik

tertentu. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merupakan tahap dimana data diteliti, dirangkum, dan difokuskan untuk tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang dipadatkan akan menyajikan gambaran yang jelas dan spesifik. Adapun kondensasi data dilakukan setelah diperoleh data, disederhanakan dan diambil data yang mendukung pembahasan serta mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyajian data (*data display*)

Setelah melakukan kondensasi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan atau menampilkan data. Penyajian data dapat berupa teks narasi, bagan, grafik, chart, dan sejenisnya. Dengan demikian, data yang didapatkan dapat mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Tahap akhir dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan, dimana data yang telah dikumpulkan, dikondensasi, dan disajikan akan dianalisis berdasarkan teori dan yuridisnya sehingga menghasilkan suatu temuan penelitian. Dari model interaktif tersebut, analisis merupakan proses yang berulang hingga menghasilkan hasil akhir penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dikenal dengan validitas data dan dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan hasil penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dengan mengevaluasi data penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pemilihan waktu yang tepat, triangulasi digunakan untuk mengevaluasi kredibilitas data (Sugiyono, 2012:189). Pada prinsipnya, triangulasi merupakan teknik pengecekan validitas untuk mengecek apakah data yang didapatkan sesuai dengan fenomena di lapangan. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan data dengan membandingkan data atau informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang beragam yaitu kepala/staf Pemerintah Desa Poncokusumo, pengelola wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS), kepala Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncokusumo. Dengan

narasumber yang beragam, akan membandingkan pendapat atau data yang diperoleh sehingga akan saling melengkapi.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan teknik pengecekan data dengan membandingkan data atau informasi yang didapat kepada sumber yang sama namun melalui metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, serta studi pustaka yang relevan khususnya di beberapa setting penelitian yaitu Pemerintah Desa Poncokusumo, Kawasan wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Poncokusumo.

Pembahasan

Desa Poncokusumo merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai desa wisata di tahun 2014. Sebagai desa wisata, Poncokusumo memiliki beberapa keunggulan wisata diantaranya objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) mulai dibuka sebagai wisata pada tahun 2019, diawali dengan hobi beberapa anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo menjelajahi kawasan hutan negara. Kemudian, menjadikan bukit Jamun *Spot Sunset* (JSS) sebagai tempat untuk berkemah (*camping*). Memahami potensi wilayah tersebut sebagai objek yang layak jual, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo mengabadikan foto kegiatan tersebut di sosial media sehingga dikenal hingga saat ini. Nama Jamun *Spot Sunset* (JSS) diambil dari nama orang yang mendiami sekitar kawasan JSS yaitu Pak Jamun. Kemudian, *Spot Sunset* ditambahkan untuk menarik perhatian wisatawan dengan atraksi wisata unggulannya yaitu tempat melihat fenomena matahari terbenam (*Sunset*).

Jamun *Spot Sunset* (JSS) merupakan objek wisata berupa kawasan perbukitan dengan ketinggian 1300 mdpl yang terletak di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sebagai bagian dari desa wisata, Jamun *Spot Sunset* (JSS) memiliki keunggulan berupa pemandangan alam dan atraksi wisata berupa fenomena matahari tenggelam (*Sunset*), fenomena matahari terbit (*sunrise*), pendakian (*tracking*), dan perkemahan (*camping*).

Pengelolaan objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) bekerja sama dengan pemilik lahan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani). Namun, SK Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum dikeluarkan sejak awal pengajuan secara legal. Sehingga keuntungan dari objek wisata dibagi kepada kedua pihak tersebut bergantung pada besarnya pendapatan dengan presentase yang belum di tentukan. Sampai tahun 2023, keuntungan dari objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) diperuntukan untuk pengembangan objek wisata itu

sendiri seperti perbaikan akses jalan, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sebagai pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo merupakan organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat untuk pengembangan desa wisata. Selain itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan penggiat wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo beranggotakan masyarakat Desa Poncokusumo yang sadar akan potensi wisata dan berkeinginan mengembangkan pariwisata di Desa Poncokusumo.

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Objek Wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) Desa Poncokusumo

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditulis, maka peneliti akan melihat bagaimana implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Wisata Poncokusumo Kabupaten Malang berbasis partisipasi masyarakat pada objek wisata Jamun *Spot Sunset* (JSS) menggunakan 2 teori, yaitu:

1. Implementasi kebijakan George Charles Edwards III

Menurut George Charles Edwards III terdapat empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Variabel tersebut diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo dapat ditinjau dengan menggunakan teori tersebut dengan 4 variabel yang mempengaruhi, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, Desa Wisata Poncokusumo membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Pertama, komunikasi antara pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo sebagai pengelola desa wisata. Komunikasi ini dijalin dengan pemberian kepercayaan oleh pemerintah desa kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata. Selain itu, komunikasi ditunjukkan dengan dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Kedua, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pengelola desa wisata. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta pengelola desa wisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Komunikasi tersebut dijalin dengan adanya pembinaan-pembinaan secara rutin bagi kepentingan implementasi kebijakan pengembangan desa wisata. Setelah pembinaan tersebut dilaksanakan, pihak pemerintah pusat dan daerah meninjau langsung bagaimana implementasinya di lapangan atau dapat disebut pendampingan.

Ketiga, antar pelaksana kebijakan. Komunikasi antar pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah antar anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Komunikasi tersebut ditunjukkan dengan kekompakan antar anggota yang dijalin melalui pertemuan rutin untuk saling berkomunikasi dan diskusi mengenai pengembangan desa wisata selanjutnya.

Menurut Edward III, terdapat 3 indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo ditinjau menggunakan 3 indikator tersebut:

1) Transmisi

Dalam implementasi kebijakan, transmisi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pembinaan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang disampaikan langsung kepada pengelola yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Selain itu, dibuktikan pula dengan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan bagaimana implementasinya di desa wisata tersebut.

2) Kejelasan

Tujuan dan mekanisme dalam suatu kebijakan harus jelas agar dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis

partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo, kejelasan komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari manfaat yang telah dirasakan dari pembinaan yang telah dilakukan sebagai bentuk komunikasi.

3) Konsistensi

Konsistensi menjadi indikator yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Komunikasi pada implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo dapat dikatakan konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara rutin sejak Desa Poncokusumo ditetapkan sebagai desa wisata.

b. Sumberdaya

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo ditinjau dari pendapat Edward III:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan SDM dalam implementasi kebijakan secara kuantitas sudah terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo yang cukup dengan regenerasi anggota. Sedangkan secara kualitas SDM yang ada memiliki kemampuan dalam pengelolaan desa wisata. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut masih memiliki kekurangan diantaranya kemampuan public speaking. Oleh karena itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo menjadikan pengembangan SDM sebagai program dengan fokus utama melalui pembinaan dan pelatihan.

2) Informasi

Ketersediaan sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan tercukupi. Hal tersebut ditunjukkan dari kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh kementerian dan dinas yang dilaksanakan secara rutin.

3) Kewenangan

Dalam implementasi kebijakan, kewenangan dibutuhkan bagi pelaksana kebijakan untuk

- memaksimalkan pengembangan yang dilakukan. Pemerintah Desa Poncokusumo memberikan kewenangan penuh atas pengembangan desa wisata kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Kewenangan tersebut juga disertai dengan dukungan terhadap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo.
- 4) Fasilitas
- Ketersediaan sumber daya fasilitas dalam implementasi kebijakan masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari akses jalan yang kurang baik dan ketersediaan sumber air yang jauh. Akses jalan yang kurang baik dikarenakan lahan yang dikelola adalah milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) sehingga perlu koordinasi lebih lanjut untuk pembangunan akses jalan.
- c. Disposisi
- Disposisi dalam implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan sikap dan komitmen pemangku kebijakan dalam menganggapi kebijakan yang telah dibuat. Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari sikap pemerintah desa yang mendukung kebijakan tersebut serta sikap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo yang menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya pengembangan wisata. Selain itu, komitmen pemerintah desa dan Pokdarwis ditunjukkan dengan rencana yang sudah disiapkan untuk kedepannya serta komitmen untuk memanfaatkan alam tanpa merusaknya.
- d. Struktur birokrasi
- Menurut Edwards III, Mekanisme yang berfungsi untuk mengawasi implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan dikatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari mekanisme pembagian tugas yang diterapkan yaitu, pemberian kewenangan oleh pemerintah desa kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo untuk mengelola desa wisata. Kemudian, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo juga membentuk struktur organisasi untuk mengoordinasikan anggota melalui tugas dan keahlian masing-masing diantaranya divisi destinasi, marketing, Sumber Daya Manusia (SDM), Promosi, Transportasi, Sarana Prasarana, Akomodasi, Seni, Cinderamata, Kuliner, dan Agro. Dengan adanya struktur tersebut, diharapkan pengembangan Desa Wisata Poncokusumo menjadi lebih terorganisir.
2. Partisipasi masyarakat menurut Marschall
- Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo dapat ditinjau dengan menggunakan teori tersebut dengan 3 indikator yang mempengaruhi, yaitu:
- a. Adanya kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat
- Kebijakan pengembangan desa wisata memerlukan peran serta masyarakat dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah desa mewadahi partisipasi masyarakat tersebut dalam organisasi dengan nama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Kelompok tersebut beranggotakan masyarakat Desa Poncokusumo yang memiliki kesadaran dalam pengembangan desa wisata. Dengan adanya kelompok tersebut dapat mewadahi aspirasi masyarakat mengenai pengembangan desa wisata melalui media kelompok
- b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
- Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan-masing masing dalam bidangnya seperti pertanian, perkebunan, seni, budaya, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan masing-masing keahlian tersebut, masyarakat terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata.
- c. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
- Sebagai pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo mewadahi setiap pendapat masyarakat melalui pertemuan rutin mingguan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka dengan diskusi dan tukar pikiran. Selain itu, pertemuan juga dilaksanakan ketika menjalankan suatu program atau event. Dengan demikian, setiap keputusan yang akan diambil berdasarkan pada musyawarah atau diskusi yang telah dilakukan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Objek Wisata Jamun Spot Sunset (JSS) Desa Poncokusumo

1. Faktor pendukung

a. Internal

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat faktor pendukung dari dalam organisasi pada implementasi kebijakan yaitu kerjasama antar pemangku kebijakan. Kerjasama tersebut dibangun antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo, masyarakat, serta pemerintah desa dengan perannya masing-masing. Pemerintah desa bertindak sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai pendukung kebijakan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo bertindak sebagai pengelola. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat saling melengkapi untuk pengembangan desa wisata lebih lanjut.

Selain itu, kerja keras anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan desa wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan Desa Poncokusumo sebelum ditetapkan menjadi desa wisata hingga sekarang terdapat beberapa objek wisata yang dikembangkan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo menjadi aktor dalam perintisan tersebut.

b. Eksternal

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Poncokusumo didukung oleh faktor eksternal atau berasal dari luar organisasi yaitu bentang alam dan budaya. Kondisi geografis Desa Poncokusumo yang terletak di perbukitan menjadi potensi wisata yang layak dikembangkan menjadi destinasi berbasis alam seperti kebun buah, sungai, air terjun, sumber air, dan hutan pinus. Selain itu, budaya yang ada di Desa Poncokusumo mulai dari kuliner, kesenian, hingga batik menjadi potensi pengembangan selain potensi alam. Hal tersebut yang menjadi modal bagi pengembangan desa wisata di Desa Poncokusumo.

2. Faktor penghambat

a. Internal

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Poncokusumo mengalami hambatan secara internal atau berasal dari dalam organisasi yaitu kemampuan public

speaking Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yaitu anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Kemampuan tersebut diperlukan sebagai pelaksana kebijakan pengembangan desa wisata. Namun, upaya perbaikan dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo dengan mengikuti dan mengadakan pelatihan berkaitan dengan hal tersebut.

b. Eksternal

Selain faktor internal, dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Poncokusumo mengalami hambatan dari faktor eksternal atau dari luar organisasi yaitu sarana prasarana dan kurangnya dukungan dana. Sarana prasarana yang kurang memadai terdiri dari akses jalan dan sumber air. Akses jalan dari desa menuju pos atau loket Jamun Spot Sunset (JSS) masih sulit dengan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan lahan yang ditempati merupakan lahan milik Perhutani sehingga perlu koordinasi lebih lanjut. Selain itu, tidak adanya ketersediaan sumber air di puncak Jamun Spot Sunset (JSS) menjadi hambatan sehingga wisatawan dapat memperoleh sumber air di pos atau loket.

Pengembangan objek wisata dan desa wisata memerlukan dukungan dana dari pihak eksternal. Kurangnya dukungan secara finansial menjadi hambatan bagi pengembangan desa wisata khususnya pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS). Dukungan dana tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan desa wisata.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan di atas, implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipatif di Desa Wisata Poncokusumo berhasil dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan dua teori yang digunakan. Pertama implementasi kebijakan menurut George Charles Edward III dengan 4 variabel yaitu (1) komunikasi, dinilai berjalan baik dengan indikasi transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan pengembangan desa wisata sudah dijalankan dengan baik melalui pembinaan dan pertemuan rutin. (2) Sumber daya terdiri dari ketersediaan informasi, wewenang, dan jumlah sumber daya manusia yang diisi. Namun masih terdapat kekurangan berupa keterampilan *public speaking* pada bagian SDM dan sumber daya yang kurang memadai berupa akses jalan dan sumber air. (3)

Disposisi menunjukkan sikap dan komitmen para *stakeholder* dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo sudah berjalan dengan lancar. (4) Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo sudah berjalan dengan baik dilihat dari mekanisme pembagian kerja yang diterapkan. Kedua, partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022) dengan 3 indikator partisipasi masyarakat yang telah dipenuhi, yaitu adanya kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo, masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan pengembangan desa wisata, Kegiatan masyarakat berlangsung dalam bentuk pertemuan rutin untuk menyuarkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni kerja sama antar pemangku kepentingan dan kerja keras anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo. Sedangkan faktor eksternal yaitu bentang alam dan budaya yang menjadi potensi pengembangan desa wisata. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut mengalami hambatan secara internal yaitu kemampuan *public speaking* Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola serta hambatan secara eksternal yaitu sarana prasarana berupa akses jalan dan sumber air serta kurangnya dukungan dana.

Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi di Desa Wisata Poncokusumo, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), diharapkan pengelola Desa Wisata Poncokusumo yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Kusumo bisa bekerja sama dengan pihak tertentu untuk pengembangan SDM. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk bekerja sama dalam hal peningkatan *public speaking* seperti akademisi ilmu komunikasi dari perguruan tinggi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kerjasama serta Pelatihan-pelatihan ini dilatarbelakangi permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya kemampuan *public speaking* Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola.
2. Sumber daya fasilitas yaitu akses jalan yang kurang memadai di Jamun *Spot Sunset* (JSS) menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis

partisipasi di Desa Wisata Poncokusumo. Selain upaya perbaikan akses jalan, peneliti menyarankan untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan transportasi berupa ojek untuk melewati akses jalan tersebut mengingat akses jalan hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 (dua). Selain dapat membantu wisatawan yang berkunjung, masyarakat sekitar dapat memperoleh penghasilan dengan jasa transportasi tersebut.

3. Pengajuan dana ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta bekerja sama dengan sektor swasta dalam kegiatan pengembangan objek wisata. Dengan adanya kerja sama tersebut, pihak pengelola objek wisata dapat menjual produk pihak terkait sehingga diharapkan pihak swasta dapat memberikan dukungan dana untuk kepentingan pengembangan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Anggara, sahya. (2018) Kebijakan Publik. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*. United States Of Amerika, Sage Publication.
- Simanungkit, Victoria. dkk. (2012) Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau. Jakarta, Asisten Deputi Urusan Ketanagalistrikan dan Aneka Usaha Kementrian Koperasi.
- Subarsono, AG. (2010) Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. CV Alfabeta.

Undang-Undang:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Nomor 556/561/kep/421.108/2014 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Jurnal:

- Darin., Usman Moonti & Sri Indriyani. (2022) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15 (1), pp 11-21.

- Dewi, Made Heny Urnila., Chafid Fandeli., dan M. Baiquni. (2013) Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 2(17), pp 129-139.
- Prabowo, Septiofera Eresus., Djamhur Hamid., & Arik Prasetya. (2016) Analisis Partisipasi Masyarakat daam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 33 (2), pp. 18-24.
- Susyanti, Dewi Winarni., dan Nining Latianingsih. (2014) Potensi Desa melalui Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Epigram*, 11 (1) April, pp 65-70.
- Wibawati, Suhita A dkk. (2021) Strategi Pengembangan Wisata Melalui Potensi Wilayah Studi Kasus Jamun *Spot Sunset* (JSS) Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL)*, 5 (1) Januari, pp. 52-60.